

BAB III

EKSISTENSI KONSEP EKONOMI MASA KINI SERTA BEBERAPA ALIRAN DALAM PEREKONOMIAN MASA KINI

A. Pengertian Ekonomi

Perkataan ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Oikos dan Nomos. Oikos artinya rumah tangga dan Nomos artinya peraturan.

Jadi secara etimologi ekonomi berarti peraturan rumah tangga. (Joehartini, 1992 : 1)

Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam kamus bahasa Indonesia, bahwa kata ekonomi itu mempunyai arti pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, perdagangan dsb). Dan dalam hal percakapan sehari-hari seringkali terungkap bahwa kata ekonomi mempunyai arti urusan rumah tangga, dan pula mempunyai arti kehematan, hemat. (Poerwadarminta, 1985 : 267)

Sedangkan definisi ekonomi secara terminologi, menurut para ahli ekonomi adalah sebagai berikut :

Menurut Paul A. Samuelson, menyatakan bahwa ilmu

ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku bagaimana manusia (masyarakat) tersebut mengadakan pilihan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri yang bermacam-macam dengan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya relatif terbatas dan mempunyai penggunaan alternatif.

Menurut L. Robins, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan aspek tingkah laku manusia yang timbul karena jaranganya alat-alat untuk mencapai tujuan yang ada.

Sebetulnya masih banyak lagi definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli, namun demi ringkasanya pembahasan ini. Maka disebutkan dua pendapat dari sekian banyaknya pendapat mengenai definisi ilmu ekonomi.

Dari sekian banyaknya definisi ilmu ekonomi dapat dibandingkan, bahwa di satu pihak ada yang menekankan pada aspek manusianya, ada yang menekankan pada faktor kepuasan dan ada pula yang menekankan pada kekurangan alat-alat pemuas kebutuhan, kelangkaan (searcity) dan kemakmuran (prosperity).

Meskipun terdapat perbedaan atas stressing dari pengertian ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh para

ahli, tetapi terdapat suatu persamaan yang mendasar, bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber-sumber alam yang ada di dunia ini. (Joerhartini, 1992 : 2)

Sehingga dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu ilmu sosial yang membicarakan tentang bagaimana usaha manusia untuk mencapai kemakmuran. Maka tidak heran kalau ilmu ekonomi ini sering pula disebut sebagai ilmu tentang kemakmuran, karena pada dasarnya dalam hal ini bagaimana semua orang atau masyarakat dapat mencapai kemakmuran ekonominya atau yang disebut dengan "Welfare Ekonmic". (Sudarso, 1991 : 7)

B. Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Sebagaimana diketahui bahwa Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan uangnya, baik itu dalam bentuk perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha kerja sama (permodalan). Sehingga dalam ajaran Islam dikenal dengan adanya istilah Syirkah. (Muhammad Yusuf al-Qardhawi, 1993 : 375)

Apabila dalam ajaran Islam tentang syirkah di bandingkan dengan konsep perekonomian modern, maka akan ditemukan macam-macam dari bentuk badan usaha, yaitu :

1. Persekutuan Firma

Adalah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha, di mana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas. Sedangkan laba yang di peroleh dari usaha tersebut akan di bagi bersama-sama. Demikian pula jika menderita kerugian, akan di pikul bersama. (Murti Sumarni, 1995 : 35)

Di mana ketentuan firma ini tentunya diatur dalam pasal 16 KUHD, yang intinya menyebutkan :

- Dalam keanggotaan, setiap anggota berhak menjadi pemimpin.
- Tanpa persetujuan dari anggota lain, tidak boleh memasukkan orang lain menjadi anggota.
- Selama seorang anggota masih hidup, keanggotaannya tidak dapat dipindahkan pada orang lain.
- Pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan tidak ada artinya.

- Sekutu yang tidak memasukkan modal (hanya tenaga saja), akan memperoleh bagian laba atau rugi sama dengan sekutu yang memasukkan modal terkecil.
(Subekti, 1994 : 11)

2. Persekutuan Komanditer

Adalah suatu persekutuan yang di dirikan oleh dua orang atau lebih, dimana anggotanya dibagi dua, yaitu :

- a. Anggota Penguasa, yang memasukkan modalnya, memegang pimpinan, menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh.
- b. Anggota Komanditer, yang memasukkan modalnya dan bertanggung jawab hanya sebesar modal itu. Karena mereka tidak turut mengurus perusahaan itu dan hanya menerima bunga saja atas modal yang di masukkannya, maka mereka juga bisa disebut dengan anggota diam (Sleeping Partner).

(R. Djoerban Wachid, 1984 : 56)

3. Persekutuan Terbatas

Yaitu suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, dimana tiap sekutu/pesero turut

mengambil bagian sebanyak satu atau lebih dari saham. Di sini para pemegang sahamnya hanya bertanggung jawab terbatas pada hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang di setorkan. Kekayaan dari persekutuan semacam ini, terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham. (lihat pasal 36-56 KUHD)

Dan untuk mendirikan suatu PT, diperlukan adanya akte notaris yang antara lain memuat; nama PT, modal PT dan sebagainya. Sehingga Perseroan Terbatas (PT) ini, merupakan suatu persekutuan yang berbentuk badan hukum, dengan memakai terjemahan dari "Naamlooze Vennotschap (NV)". Dimana hal itu dipengaruhi oleh "Company Limited by Shares", sehingga dalam undang-undang (KUHD) pun muncullah istilah perseroan terbatas sebagai terjemahan dari Naamlooze Vennootschap (NV) yang berarti perkumpulan tanpa nama.

Yang mana istilah "terbatas" yang terdapat dalam perseroan terbatas ini tertuju pada tanggung jawab para pesero atau pemegang saham, yang luasnya hanya terbatas pada jumlah nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. (R.T Sutantya R. Hadhikusuma, 1991 : 39)

C. Sistem-Sistem Perekonomian

Dalam penggunaan suatu sistem perekonomian, tentunya antara suatu negara dengan negara lainnya berbeda-beda. Oleh karena itu, demi suksesnya suatu perusahaan harus mengetahui dan mendalami sistem perekonomian mana yang di anut oleh negara di mana perusahaan itu berada. Dengan demikian, akan dengan mudah memecahkan masalah operasional perusahaan sehari-hari.

Untuk lebih jelasnya, kami kemukakan beberapa bentuk sistem perekonomian dunia sejak dahulu hingga saat ini.

1. Kapitalisme

Pada hakekatnya kapitalisme merupakan "hasil penyimpangan" dari filsafat politik yang bernama liberalisme yang berkembang pada zaman pencerahan (Enlightment) pada abad ke-18.

Semangat liberalisme itu mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia sama sekali tidak jahat, dan sejarah umat manusia dapat di simpulkan sebagai sejarah kemajuan (progress) yang menuju pada suatu tatanan

rasional dalam kehidupan, sehingga tuntutan spritual dari lembaga agama apapun tidak lagi di perlukan. (M. Amien Rais, 1991 : 91)

Mengenai konsep kapitalisme secara rinci dan jelas dapat di telusuri dari tulisan-tulisan para ahli. Di katakan bahwa kapitalisme adalah suatu sistem perekonomian yang secara jelas di tandai oleh berkuasanya kapital.

Dalam sistem kapitalisme mengandung unsur-unsur pokok yang merupakan semangat atau pandangan ekonomi-yang merupakan jumlah dari keseluruhan tujuan, motif dan prinsip. Motif dan prinsip ini di dominasi oleh tiga gagasan; perolehan, persaingan dan rasionalitas.

(Muhammad Abdul Mannan, 1993 : 311)

Sehingga di dalam sistem perekonomian kapitalisme ini, seseorang bebas untuk memiliki kekayaan perusahaan, bersaing secara bebas dalam pasar, seseorang bebas dalam memilih dan membuat barang/jasa yang di inginkan. Kebebasan seperti ini, di sebut dengan "Laissez Faire". seseorang bebas bertindak sejauh uang yang mereka miliki dan hal itu merupakan penggerak utama dari kegiatan perekonomian kapitalis.

Jadi dalam sistem kapitalisme ini terdapat tiga sifat pokok, yaitu :

1. Hak milik atas barang modal ada di tangan orang perseorangan.
2. Harga barang/jasa di tentukan oleh permintaan dan penawaran.
3. Di jamin adanya persaingan bebas, kebebasan untuk berdagang dan mempunyai pekerjaan, kebebasan untuk mengadakan kontrak serta kebebasan untuk hak milik dan kebebasan untuk mendapatkan keuntungan. (Murti Sumarni, 1995 : 28)

2. Sosialisme

Dalam ensiklopedi nasional Indonesia di terangkan, bahwa sosialisme adalah suatu ajaran atau doktrin yang menekankan pada nilai-nilai kebersamaan pemilikan dan menentang adanya penguasaan barang-barang produksi terpenting oleh sekelompok orang. Hal ini berarti bahwa sosialisme di pandang sebagai pedoman untuk mengatur pola-pola distribusi barang-barang produksi untuk bisa menikmati hasil-hasil pembangunan, baik dalam bidang kebudayaan, sosial maupun yang menyangkut materi. (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1991, XV : 197)

Pada sistem perekonomian sosialisme ini, harta kekayaan tersebar, di miliki dan di selenggarakan oleh koperasi-koperasi produksi dan konsumsi, serikat kerja badan hukum masyarakat dan organisasi lain atas dasar sukarela. Sehingga tidak heran, bila negara-negara yang menganut paham sosialisme pemerintahannya bersifat demokrasi. Di mana dalam bidang perekonomian pemerintah secara tidak langsung mendorong kegiatan ekonomi dengan merencanakan anggaran belanja, sistem perpajakan, ekspor dan lain-lain.

Jadi dalam sistem perekonomian sosialisme, seseorang secara relatif bebas untuk memilih usaha atau pekerjaan yang di inginkan, tetapi pemerintah turut campur tangan dengan berusaha menyesuaikan kebutuhan individu dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah hanya menguasai perusahaan-perusahaan yang vital bagi kepentingan masyarakat, agar kebutuhan masyarakat dapat di penuhi dengan adil dan merata.
(Murti Sumarni, 1995 : 29)

Sebetulnya bila kita telaah lebih jauh, kita dapat menemukan titik kesamaan antara sistem perekonomian kapitalisme dengan sistem perekonomian sosialisme. Bahwa keduanya bertujuan untuk mencapai

tingkat maksimal kepuasan materealistis masyarakat. Meskipun demikian, metode yang di tempuh di antara keduanya berbeda satu sama lain.

Kapitalisme lewat individualisme, sedangkan sosialisme melalui kolektifisme. Keduanya berlomba mengejar kesejahteraan material sebagai tujuan akhir, sehingga kadangkala keduanya menampilkan watak hedonisme. (M. Amien Rais, 1991 : 95)

3. Komunisme

Istilah komunisme yang berasal dari kata latin "Communis", pada umumnya istilah tersebut di gunakan untuk menguraikan perbuatan atau keyakinan akan perlunya suatu pengawasan sosial atas kehidupan ekonomi, termasuk hak milik sosial atas harta benda. Di samping arti historik dan umum, istilah komunis juga mempunyai arti sebagai tindakan revolusioner untuk menumbangkan masyarakat kapitalis dengan jalan kekerasan. (Muhammad Abdul Mannan, 1993 : 322)

Di dalam sistem perekonomian komunisme, peranan pasar untuk menentukan arah produksi hampir tidak ada. Jika dalam perekonomian kapitalisme di sebut dengan ekonomi pasar, maka dalam perekonomian komunisme bisa

di katakan dengan ekonomi pemerintah yang bersifat totaliter atas keputusan ekonomi yang di buat. Dalam hal ini hak milik seseorang di hapuskan, semua masyarakat adalah karyawan negara, kebebasan politik di awasi oleh pusat (pemerintah). (Murti Sumarni, 1995 : 28-29)

Kalau kita ingin mengetahui gambaran tentang sistem perekonomian komunisme ini, kita akan dapati di beberapa negara seperti di Rusia dan di RRC. Misalnya di Rusia, nampak dengan jelas sistem perekonomian yang di pakai adalah sistem perekonomian komunisme. Di mana di Rusia itu merupakan suatu sistem perekonomian totaliter yang di kuasai secara total oleh negara. (M. Manullang, 1980 : 113)

Sebagaimana diketahui, bahwa sistem perekonomian komunisme ini, merupakan suatu tindakan revolusioner yang ingin menumbangkan masyarakat kapitalis. Sehingga bila kita teliti lebih jauh, maka kita akan mendapati hal-hal yang sangat kontras antara sistem perekonomian kapitalisme dengan sistem perekonomian komunisme. Perbedaan tersebut terletak pada hal, yaitu :

1. Hak milik atas alat-alat produksi

2. Persaingan

(M. Manullang, 1980 : 114)

Kapitalisme mengatakan, bahwa persaingan di tinjau dari sudut ekonomi itu dapat di benarkan. Karena dengan adanya persaingan, maka setiap orang harus senantiasa waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasar dan selalu berusaha menambah efisiensi untuk memperbaiki kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di pasar.

Kemudian kapitalisme lebih menyukai pemilihan alat-alat produksi oleh perseorangan, karena pemilihan atas alat-alat produksi itu berarti kekuasaan atas kehidupan orang lain. Dan sebaiknya kekuasaan seperti itu di pegang oleh perseorangan yang tidak memegang kekuasaan politik, Karena kalau alat-alat produksi di kuasai oleh pemerintah yang sudah mempunyai kekuasaan politik, maka akan sukarlah bagi rakyat untuk berusaha, terlebih lagi bila pemerintah itu bukan pemerintah yang demokrasi.

4. Merkantilisme

Werner sombart mengatakan bahwa ada tiga macam sistem perekonomian yang berlaku di Eropah, yaitu :

1. Perekonomian Tersendiri
2. Kerajinan dan Pertukangan
3. Kapitalisme

Lebih lanjut Sombart mengatakan perbedaan-perbedaan yang prinsip antara masa pertama, masa ke dua dan masa ke tiga. Pada masa pertama dan masa ke dua, dinamainya dengan masa sebelum kapitalisme atau masa pra kapitalisme. Di mana pada masa pertama, belum ada tukar menukar, pada masa ini di titik beratkan pada pertanian, sehingga ekonomi pada masa itu pada umumnya masih bersifat setempat dan mencukupi untuk diri sendiri. pada masa kedua, tukar menukar sudah menjadi hal yang umum, walaupun demikian pertanian tetap di usahakan, perusahaan kerajinan dan pertukangan merupakan stressing pada masa itu. (Muhammad Hatta, 1957 : 175-176)

Pada masa ke tiga, sering kali di sebut dengan "Perekonomian Feodal". Perekonomian pada masa ini di pusatkan pada "Manorial Estate", di mana orang bekerja di lapangan pertanian dengan di pimpin kaum bangsawan. Jadi kekuasaan ada di tangan kaum bangsawan, kaum bangsawan dengan kekayaan yang di milikinya memimpin masyarakat di lingkungannya. Kehidupan yang di alami

masyarakat pada masa itu di pahami sebagai nasib yang sudah di takdirkan oleh Tuhan. (M. Manullang, 1980 : 109)

Baru pada masa selanjutnya pada akhir abad pertengahan, lahirlah negara-negara nasional yang menggantikan negara feodal. Dan saat itu pula timbulnya kapitalisme muda yang pada masa ini sering di sebut dengan masa merkantilisme. Di mana dengan lahirnya negar-negara nasional ini bertujuan untuk menumpas kekuasaan tuan-tuan tanah atau kaum feodal, dengan menyewa serdadu-serdadu upahan. (Murti Sumarni, 1995 : 27)

Sesuai dengan namanya merkantilisme (asas perdagangan), maka pada sistem perekonomian merkantilisme ini di titik beratkan pada perniagaan, khususnya perniagaan luar negeri. Menurut anggapan pada sistem ini, bahwa kemakmuran negara/masyarakat akan tercapai jika jumlah barang-barang yang di impor kurang dari jumlah barang yang di ekspor. Artinya nilai ekspor itu lebih tinggi dari pada nilai impor. (Kaslan A. Tohir, 1975 : 13)